

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dua dekade, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mulai diberlakukan di negeri ini ketika berakhirnya masa orde baru dan memasuki era reformasi, ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian mulai aktif pada Januari 2001 dimana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dari segi pengelolaan pemerintahan maupun dari segi keuangan atau biasa disebut dengan desentralisasi fiskal. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 untuk mengganti Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 untuk mengganti Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah tersebut dan desentralisasi fiskal. Pada dasarnya Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Dengan adanya Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah melalui pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka biasanya akan semakin maju daerah tersebut. (Saragih, 2003)

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan daerah dalam menaikkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam mencapai standart pelayanan minimum. Hal ini di wujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. (Mardiasmo,2004)

Desentralisasi fiskal merupakan cara untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan keputusan publik yang lebih demokratis. Adanya desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik,2002).

Dengan seiring berjalannya desentralisasi fiskal di negeri ini yang semakin lama dinilai tidak sesuai dengan keadaan perkembangan Pemerintah Daerah, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggara pelaksanaan pemerintah daerah sehingga perlu diganti. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dengan memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Daerah, keanekaragaman, potensi yang dimiliki daerah, dan tantangan persaingan global yang semakin kompetitif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka dari itu Pemerintan

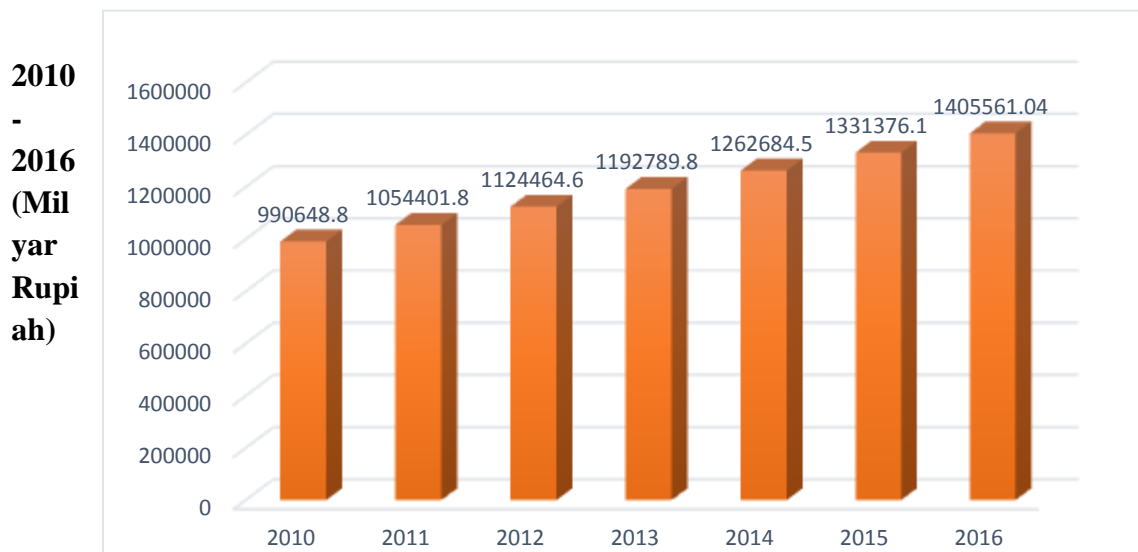
mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang dinilai undang undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah yang diharapkan agar terciptanya efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang publik, sistem tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan daya saing nasional maupun antar daerah. Kebijakan otonomi daerah juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan dan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing (Pilliang, 2003).

Perwujudan desentralisasi fiskal adalah dengan penggunaan dana perimbangan yang diserahkan dan dilimpahkan wewenang penggunaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini memiliki komponen yaitu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil pajak (DBHP), dan dana hasil bukan pajak (DBHBP). Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri besaran pendapatan asli daerah (PAD). Dana perimbangan dan PAD menjadi kewenangan daerah untuk mengalokasikannya demi kesejahteraan masyarakat, selain itu pula dengan adanya dana tersebut pemerintah daerah diharapkan lebih bijak dalam melakukan belanja daerah. Belanja daerah diwujudkan dalam belanja langsung dan belanja tak langsung,

belanja tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Rahayu,2017)

Salah satu indikator untuk melihat suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yaitu menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian daerah tersebut. Nilai tambah bruto ini mencakup upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan, penyusutan serta pajak tidak langsung neto. Dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing –masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor, akan diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto.

Gambar 1.1 PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun



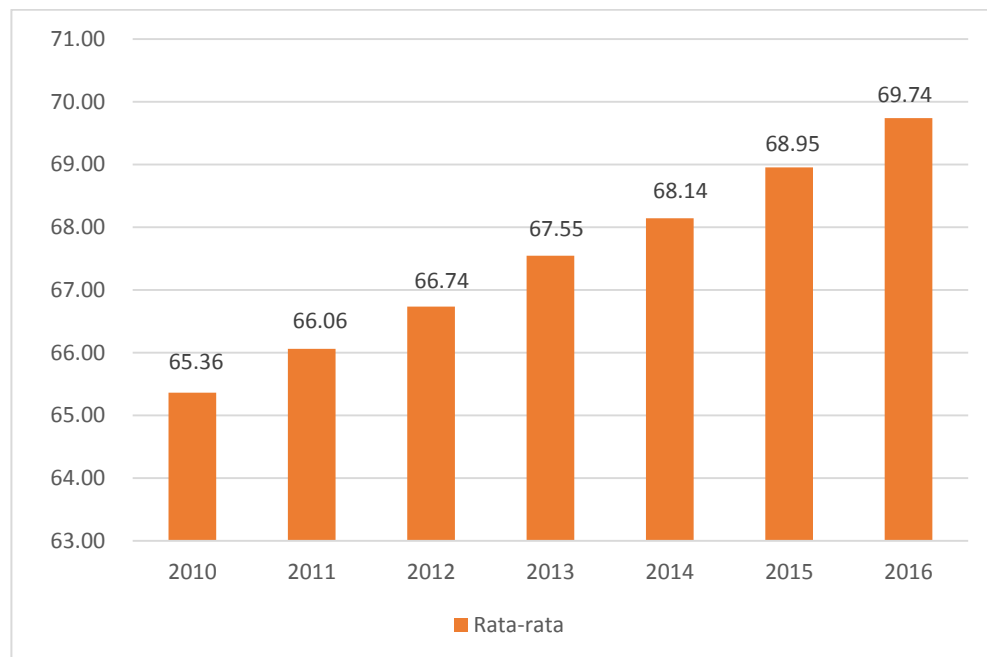
mber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Diolah)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 pada gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa dari tahun 2010 sampai 2016 terus mengalami peningkatan yang baik. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 menuju tahun 2016 sebanyak 74.184,94 milyar rupiah yang sebelumnya 1.331.376,1 milyar rupiah menjadi 1.405.561,04 milyar rupiah. Kenaikan PDRB provinsi Jawa Timur tahun 2010 sampai 2016 tak lepas dari terus membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat pada setiap kabupaten/kota, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur bisa dikatakan baik karena dapat mampu menyumbang dan mendorong PDRB provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia merupakan suatu komponen yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Dalam (Brata, 2004) pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur suatu negara apakah suatu negara tersebut termasuk negara maju apa negara berkembang atau negara terbelakang.

Gambar 1.2 Rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

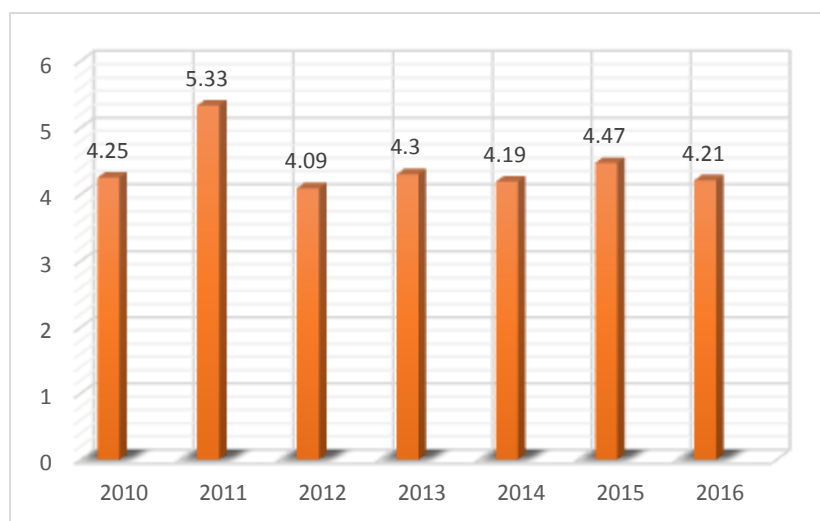


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Diolah)

Rata-rata indeks pembangunan manusia provinsi jawa timur dapat dilihat pada Gambar 1.2, terlihat bahwa rata-rata indeks pembangunan manusia provinsi jawa timur tahun 2010 sampai 2016 terus mengalami kenaikan. Kenaikan disetiap tahunnya berkisar antara 0,70% sampai 0,90%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah provinsi jawa timur cukup baik.

Timbulnya pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja. Laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja lebih lambat daripada laju pertumbuhan penawarannya. Dengan kata lain, pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja. Sebagian pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan disebut pekerja (employed). Sedangkan yang tidak atau belum memperoleh pekerjaan disebut pengangguran (unemployed), namun masih terus mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Untuk menghitung pengangguran terbuka dapat menggunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu dengan rasio dari seberapa banyak pengangguran terhadap penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja (Sukirno, 2000).

Gambar 1.3: Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Diolah)

Tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 pada Gambar 1.3 terlihat bahwa kenaikan terjadi pada tahun 2011, 2013, dan 2015. Kemudian penurunan terjadi pada tahun 2012, 2014, dan 2016. Dari gambar tersebut dapat dilihat juga bahwa tingkat pengangguran di provinsi Jawa Timur belum bisa mengalami penurunan drastis. Namun juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Timur dapat dikatakan fluktuatif dari tahun 2010 - 2016.

Indeks pembangunan manusia dan Tingkat pengangguran terbuka merupakan suatu hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketika PDRB di suatu daerah mengalami peningkatan maka hal ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia tersebut maka secara langsung tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan. Hal itu merupakan suatu gambaran perekonomian suatu daerah mengalami pertumbuhan yang cepat dan tepat. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya harus adanya kebijakan fiskal suatu daerah yang tepat, efektif dan efisien dalam alokasi keuangan daerah.

Data tentang pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Timur tersebut cukup menarik apalagi diteliti

lebih mendalam dalam ranah kabupaten/kota di provinsi jawa timur. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk meneliti hubungan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal seberapa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota provinsi jawa timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Derajat Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara Bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di provinsi jawa timur dari tahun 2010 sampai 2016?
2. Apakah Derajat Desentralisasi Fiskal, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jawa timur dari tahun 2010 sampai 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara Bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di provinsi jawa timur dari tahun 2010 sampai 2016,

2. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jawa timur dari tahun 2010 sampai 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota provinsi jawa timur,
2. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai rujukan atau informasi bagi mereka yang meneliti atau mengkaji tentang desentralisasi fiskal,
3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi jawa timur dalam mengeluarkan dan mengambil kebijakan tentang keuangan daerah ataupun tentang desentralisasi fiskal,